

Aspek hukum kawasan ekonomi khusus (Studi mengenai Kawasan Batam)

Nihayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269878&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan ekonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developed countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memiliki dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.

Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

This thesis focusses on legal aspects of special economic zone with start from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy

maker based on two arguments, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of this thesis is based on a legal normative approach, benefiting from economic and law analysis and comparison methods, which compare experience from other countries. Its writing employs a descriptive-analytic style.

The thesis reveals that SEZ has some characteristics, namely legal aspects deriving from international treaties, existing respective legal systems, and its operational side such as permit regulations, tax facilities, labour, customs, immigration and regional development. Learning from experience from other countries reveals that legal aspects have a significant role to determine its efficiency and effectiveness of implementation. Therefore, from an economic analysis of law, SEZ reaches efficiency in pursuing its goal. From the Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varies to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in terms of economic and law context.

From a legal perspective, there are some regulations as references if policy makers would develop SEZ policy. The regulations, namely, regulation of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide a rule of law for investors. Until the writing process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in terms of its establishment, facilities, labour, immigration and customs. Its legal materials reveal that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provides some recommendations of policy that synchronization of regulation is essential if one would establish SEZ in Indonesia. A legal umbrella in a high level which is law, as possible legal aspects to synchronize sprawling regulation.